



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)

ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>



Evaluasi program penyediaan perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah di kota Bukittinggi

Anggih Prastiyo¹, Melinda Noer¹, Verinita Verinita¹

¹Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mar 25th, 2022

Revised Apr 18th, 2022

Accepted May 27th, 2022

Keyword:

Low income
Housing

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyediaan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota Bukittinggi, mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota Bukittinggi dalam memenuhi kebutuhan perumahan, menganalisis hasil evaluasi program pemenuhan kebutuhan perumahan di masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bukittinggi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa program pembiayaan perumahan, dimana terdapat berbagai program yang mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan yaitu FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) atau biasa disebut KPR Subsidi, SBUM (Bantuan Uang Muka Bersubsidi), BP2BT (Bantuan Uang Muka Bersubsidi), BP2BT -Bantuan Pembiayaan Berbasis) Tabungan) dan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). Masing-masing program tersebut dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai instansi terkait. Di sisi lain, MBR juga melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan mereka. Upaya pertama adalah menghemat dan menghemat pengeluaran. Upaya kedua adalah meningkatkan partisipasi dan solidaritas dari lingkungan sosial sekitar. Namun, ada juga beberapa kendala bagi MBR Kota Bukittinggi dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas dapat disimpulkan bahwa nilai efektivitas program pemenuhan kebutuhan rumah yang telah dilakukan dinilai cukup efektif. Kemudian pada tingkat efisiensi yang dinilai dari segi pengawasan rumah dan pendampingan sesuai kebutuhan dinilai cukup efisien. Dalam perhitungan dilakukan dalam hal kecukupan bantuan yang diterima berada pada tingkat yang cukup. Dalam perhitungan yang dilakukan terhadap manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima berada pada tingkat yang cukup. Dari hasil perhitungan dengan nilai akurasi dapat disimpulkan bahwa dari segi pendapatan sudah dianggap layak karena semua responden memenuhi syarat dari segi pendapatan untuk mendapatkan bantuan.



© 2022 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Prastiyo, A.,
Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: anggihprastiyo08@gmail.com

Pendahuluan

Permintaan akan tempat tinggal atau perumahan semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung. Kota-kota berjuang untuk memenuhi permintaan perumahan karena ketersediaan lahan yang terbatas dan berbagai aktivitas perkotaan. Untuk menyediakan perumahan

bagi masyarakat, digunakan dua pendekatan: pengertian kebutuhan perumahan (*housing need*) dan konsep permintaan perumahan (*housing demand*) (permintaan perumahan) (Sastra dan Marlina 2006).

Membangun dan memiliki rumah pada hakikatnya merupakan kebutuhan bagi setiap individu atau kelompok yang tinggal di suatu negara. Negara berfungsi sebagai jembatan untuk memenuhi persyaratan ini; pada kenyataannya, beberapa individu tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik perumahan di lingkungan sosial ekonomi mereka. Beberapa pemerintah kota telah mengidentifikasi perumahan dan pemukiman sebagai prioritas pembangunan. Secara umum, inisiatif ditujukan untuk mendorong perbaikan tempat tinggal yang tidak layak huni (Ghafaralie 2013).

Kebanyakan orang memiliki penghasilan sederhana yang berada di bawah standar bank untuk pinjaman kepemilikan rumah (Panudju, 1999). Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah. Selain masalah sumber daya yang terbatas, ada juga kepercayaan luas bahwa membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah tidak terlalu menguntungkan dan tidak dapat menghasilkan keuntungan besar karena penyewa memiliki sumber daya yang terbatas.

Dengan demikian, karena tingkat ekonomi yang rendah, mereka memiliki akses yang terbatas untuk menentukan kehidupan mereka sendiri dan terus-menerus mengalami tekanan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, yang dapat menyebabkan budaya yang buruk dan menyebabkan etos kerja dan pola pikir yang buruk, rendah. Masyarakat berpenghasilan membutuhkan bantuan dan dukungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal (perumahan). Berbeda dengan kebutuhan sandang dan pangan, kebutuhan akan tempat tinggal memerlukan pengeluaran yang cukup besar, sehingga menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Isu-isu yang disebutkan di atas tersebar luas di wilayah metropolitan. Di Indonesia, tingkat perekonomian kota cenderung tidak seimbang antara masyarakat ekonomi kelas atas dengan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan perumahan, karena masih banyak warga perkotaan yang kesulitan mencari tempat tinggal yang layak.

Bukittinggi merupakan salah satu kota yang kekurangan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurut data Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dari luas Kota Bukittinggi yang hanya 25.239 km², 44,89 persen adalah perumahan, 10,54 persen adalah perdagangan dan jasa, dan 21,44 persen adalah ruang terbuka hijau. Jumlah individu yang hidup di bawah tingkat kemiskinan resmi di Bukittinggi dilaporkan menjadi 6.010 pada tahun 2020, mewakili proporsi 4,54 persen (Statistik, 2021). Dalam upaya mengatasi persoalan kebutuhan penginapan bagi MBR, pemerintah sendiri sebenarnya telah mengaktualisasikan berbagai program yang ditujukan untuk mempermudah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan penginapan yang lebih baik dari rata-rata.

Hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah berdirinya Perum Perumnas sejak tahun 1974. Dengan tujuan berkumpulnya kebutuhan akan penginapan secara luas, khususnya Kota Bukittinggi. Penataan penginapan oleh Perum Perumnas pada dasarnya dikoordinasikan untuk memenuhi kebutuhan penginapan pelajaran pusat bawah. Sehingga dalam perkembangannya banyak dibangun unit tipe kecil, khususnya tipe 21, tipe 27 dan tipe 36. Tipe kecil ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kewajiban biaya, kemudian di berikan tipe RSS (Sangat Rumah Dasar) dan RSH (Dasar Suara Rumah Tangga). Oleh karena itu, kelompok yang lemah secara finansial dipercaya dapat memenuhi kebutuhan penginapan mereka.

Selain masalah keuangan, MBR di Kota Bukittinggi juga tertimpa masalah lain, seperti biaya tanah yang berlebihan di seluruh wilayah metropolitan. Menurut temuan awal peneliti lapangan, harga tanah di Kota Bukittinggi berkisar antara 3 juta hingga 4 juta rupiah per meter persegi. Jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Sumatera Barat, harga ini relatif lebih tinggi.

Mahalnya harga tanah di Bukittinggi menjadi alasan banyak pemukiman hanya mengandalkan sewa rumah dan membangun rumah tanpa IMB. Biasanya didorong dan diperparah oleh kerangka sosial terdekat, di mana banyak tanah dan tanah dimiliki oleh kelompok masyarakat yang berasal dari daerah sekitar. Pendatang merasa sulit mendapatkan tanah untuk digunakan atas nama pribadi, karena mereka berurusan dengan orang-orang yang bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadaan ini semakin menyulitkan MBR untuk menemukan rumah-rumah konvensional dan terjangkau di Kota Bukittinggi. Sesuai dengan kelompok Kesatuan Masyarakat Kelahiran Nusantara (AMAN), dinyatakan bahwa masyarakat hukum baku adalah masyarakat yang hidup berdasarkan turun temurun dari zaman ke zaman pada suatu wilayah baku, yang berdaulat dan memiliki kekayaan bersama, sosial- kehidupan budaya yang dikendalikan oleh hukum, tradisi dan pendidikan standar yang mengawal keberlangsungan kehidupan masyarakat. Kondisi itulah yang

kemudian membuat masih banyaknya MBR di Kota Bukittinggi yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan perumahan mereka. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Bukittinggi Erwin Umar pada bulan Mei 2021, sedikitnya masih terdapat 1.407 unit rumah yang masuk kategori tidak layak huni.

Pemerintah Kota Bukittinggi sendiri bukannya tanpa upaya dalam menyikapi persoalan tersebut. Salah satu upaya yang coba dilakukan adalah dilaksanakannya program rehabilitasi rumah, yang merupakan program strategis dalam peningkatan kualitas dalam pembangunan kota. Pernyataan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bukittinggi, diketahui bahwa pada tahun 2019 telah disalurkan dana bantuan sebesar Rp. 7,1 Miliar, baik yang berasal dari APBN maupun APBD Kota Bukittinggi. Program ini telah menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Kota Bukittinggi karena mengingat peningkatan fungsi kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata. Program ini melibatkan beberapa bagian dari Pemerintah Bukittinggi yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Sosial.

Selain itu pada tahun 2020 yang lalu, juga telah dilakukan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan jumlah Rp. 17.5 juta / rumah. Dana tersebut digunakan Rp. 15 juta untuk pembelian bahan bangunan rumah dan Rp. 2,5 juta sisanya digunakan untuk membayar upah tukang sebagai pekerja pada pembangunan rumah tersebut. Dana yang digunakan dalam program ini diambil dari APBN Kota Bukittinggi. Bantuan stimulan ini diberikan langsung kepada tiap kepala keluarga dan langsung dibelanjakan untuk pembelian kebutuhan bangunan.

Bantuan bedah rumah untuk MBR di Kota Bukittinggi tidak hanya bersumber dari APBN dan APBD saja, namun juga berasal dari dana bantuan CSR (Corporate Social Responsibility). Diketahui bahwa PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang merupakan BUMN Kementerian Keuangan, telah memberikan dana bantuan CSR sebesar Rp. 1 miliar yang digunakan untuk rehab rumah di kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah (ATTS) dan Pakan Kurai dalam program Kota Ku, pada tahun 2020 yang lalu (bukittinggikota.go.id). Hal ini dilakukan sebagai komitmen Pemko Bukittinggi yaitu untuk menuntaskan persoalan rumah tak layak huni di Bukittinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi penyediaan pemenuhan kebutuhan perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bukittinggi, 2) Mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bukittinggi dalam memenuhi kebutuhan perumahan. Dan 3) Menganalisis hasil evaluasi program pemenuhan kebutuhan perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Bukittinggi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian metodologi campuran, yaitu suatu tahapan penelitian yang menggabungkan dua pendekatan penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Mixed research adalah metode penelitian yang memadukan data kualitatif dan kuantitatif. Sementara itu, Sugiyono (2013) mendefinisikan metode campuran sebagai teknik penelitian yang menggabungkan dua metodologi penelitian, kualitatif dan kuantitatif, dalam suatu kegiatan penelitian untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, valid, dapat dipercaya, dan objektif.

Untuk menjawab rumusan masalah pada Bab I, diperlukan pendekatan metode campuran; rumusan masalah pertama dapat dijawab dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan rumusan masalah kedua dapat dijawab dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan yang akan mengarah pada pengetahuan yang lebih baik tentang evaluasi program kebutuhan perumahan bagi penduduk berpenghasilan rendah di Kota Bukittinggi.

Pendekatan pencampuran bertahap digunakan dalam penyelidikan ini. Teknik ini, menurut Creswell (2010), adalah salah satu di mana peneliti memadukan data yang diperoleh dari satu metode dengan data yang diperoleh dari metode lain. Teknik ini dapat dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan data kualitatif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kuantitatif, dalam hal ini melalui survei. Teknik ini dibagi menjadi tiga bagian:

1. Teknik penjelasan yang berurutan. Tahap pertama dari metode ini adalah mengumpulkan dan mengevaluasi data kuantitatif, diikuti dengan pengumpulan dan evaluasi data kualitatif berdasarkan hasil kualitatif asli. Data kuantitatif diberi bobot atau prioritas ini..
2. Strategi untuk eksplorasi berurutan. Metode ini merupakan kebalikan dari strategi sekuensial eksplanatori di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif pada tahap pertama sebelum mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif pada tahap kedua tergantung pada hasil tahap pertama. Teknik ini sangat menekankan pada data kualitatif.

3. Strategi untuk transformasi berurutan. Dalam teknik ini, peneliti menggunakan sudut pandang teoretis untuk mengembangkan prosedur penelitian tertentu. Pada paradigma ini, peneliti dapat memilih salah satu dari dua cara pada tahap pertama, dan bobot dapat diberikan pada salah satu dari dua metode tersebut.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini menggunakan teknik metode campuran sekuensial, yaitu strategi esplanatori sekuensial. Jadi, tahap awal adalah melakukan wawancara, dilanjutkan dengan analisis data kualitatif. Penelitian campuran, sering dikenal sebagai penelitian metode campuran, mencakup berbagai desain penelitian. Dengan kata lain, campuran mendekati desain dengan status yang sesuai. Dalam strategi ini, peneliti menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif pada berbagai tingkat untuk memahami fenomena yang diselidiki. Selanjutnya desain metode campuran (mix method) bersifat dominan-kurang dominan dalam satu bidang, terkadang mirip dengan satu teknik, seperti psikologi eksperimental dengan metode kuantitatif. dan metodologi penelitian antropologi kualitatif Pendekatan ketiga adalah metode campuran sekuensial di mana peneliti melakukan tahap penelitian penelitian kualitatif terlebih dahulu dan kemudian tahap penelitian kuantitatif secara terpisah, atau sebaliknya. Creswell menyebut ini sebagai desain dua tahap. Creswell (2010) Yang terakhir adalah desain metode campuran paralel atau bersamaan. Data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan secara bersamaan dan dievaluasi untuk saling melengkapi.

Desain penelitian penelitian ini termasuk metodologi campuran dengan status sebanding. Strategi cross-sectional digunakan dalam studi kuantitatif untuk mengumpulkan informasi mengenai program kebutuhan perumahan untuk daerah berpenghasilan rendah di Kota Bukittinggi. Metode kualitatif berusaha menganalisis item dalam keadaan alaminya dan menyelidiki fakta/fenomena yang tidak dapat didefinisikan untuk memberikan data deskriptif.

Hasil Penelitian

Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Pada MBR

Kebutuhan akan perumahan memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Tercukupinya kebutuhan akan rumah menjadi cerminandari seprang individu di dalam masyarakat. Pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kebutuhan perumahan merupakan hal yang sulit diperoleh, karena dari berbagai sebab, ketersediaan rumah telah semakin berkembang dan menjadi sesuatu yang dianggap mewah. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menyoroti permasalahan kebutuhan perumahan bagi MBR, khususnya di Kota Bukittinggi. Dari sempitnya lahan hingga semakin melonjaknya harga tanah, menjadi polemik yang membuat MBR di Kota Bukittinggi semakin susah mendapatkan kebutuhan akan perumahan tersebut. Dalam bab ini, peneliti akan membahas beberapa fakta yang ditemui pada saat dilakukannya penelitian lapangan, yang berguna dalam menganalisa permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR di Kota Bukittinggi.

Kebutuhan rumah atau perumahan semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai akibat dari terus bertambahnya jumlah penduduk. Ketersediaan lahan yang terbatas dan berbagai aktivitas perkotaan, merupakan hal yang cukup sulit bagi kota untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Rumah harus menjamin kepentingan keluarga untuk tumbuh, memberi kemungkinan untuk hidup bergaul dengan tetangganya, dan harus memberi ketenangan, kesenangan, ebahagiaan, dan kenyamanan pada segala peristiwa hidupnya (Frick, 2006).

Pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terpenuhinya kebutuhan rumah merupakan hal yang sulit diperoleh, khususnya di daerah perkotaan. Untuk itulah diperlukan adanya campur tangan dari pihak lain, seperti pemerintah maupun non-pemerintah, dalam mengupayakan adanya langkah-langkah yang dilakukan demi tersedianya kebutuhan perumahan bagi MBR. Atas kerjasama dari berbagai pihak ini lah diharapkan adanya kemudahan bagi MBR dalam memperoleh kebutuhan perumahan.

Program pembiayaan perumahan, dimana terdapat berbagai program yang menyokong pemenuhan kebutuhan perumahan, yaitu FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) atau yang biasa disebut KPR Subsidi, SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka), BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) dan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). Masing-masing program tersebut dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai instansi terkait. Program Bedah Rumah, dimana program tersebut baru dapat direalisasikan pada tahun 2017, dan terus berjalan setiap tahunnya. Juga terdapat peran perusahaan BUMN yang terlibat pada program ini pada tahun 2020 yang lalu. Ketiga, rusunawa, dimana Pemko Bukittinggi dibantu pendanaannya oleh pemerintah pusat mendirikan rusunawa di daerah Bukik Apik sebagai alternatif hunian yang layak bagi MBR. Khusus untuk program FLPP, bunga kredit yang dibebankan kepada kreditur

berpola flat, agar meringankan beban masyarakat yang memperoleh bantuan. Dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJM) Kementerian PUPR tahun 2020-2024, terdapat sebuah target mengenai peningkatan kebutuhan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya MBR. Dari berbagai program tersebut, alokasi anggaran paling banyak diserap oleh program FLPP, yang dipandang sebagai program yang paling efektif dan efisien.

Dari sisi lain, para MBR pun melakukan berbagai upaya agar kebutuhan perumahan mereka dapat terpenuhi. Upaya yang pertama adalah dengan menabung dan menghemat pengeluaran. Upaya yang kedua ialah dengan meningkatkan partisipasi dan solidaritas dari lingkungan social di sekitar. Akan tetapi terdapat pula beberapa hambatan bagi MBR Kota Bukittinggi dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan. Salah satunya adalah status kepemilikan rumah bagi sebagian MBR yang pada saat ini menempati rumah yang bukan milik mereka. Selain itu, juga terdapat alasan lokasi perumahan subsidi yang berada di luar wilayah perkotaan, sehingga menjadi tidak efisien dan efektif dimanfaatkan oleh para MBR tersebut.

Munculnya berbagai program-program yang bertujuan memfasilitasi penyediaan perumahan bagi MBR, menjadi solusi yang diharapkan agar mereka dapat memiliki tempat tinggal yang layak atas kepemilikan sendiri. Namun pun begitu, keikutsertaan mereka pada berbagai program tersebut bukan tanpa adanya usaha dan upaya dalam meraih kegunaan dari tujuan program. Para MBR tetap saja harus mengiringinya dengan cara-cara tertentu, agar keinginan mereka untuk dapat memiliki rumah sendiri yang layak terwujud. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh para MBR adalah dengan menabung. Uang pendapatan mereka yang minim, masih saja diharuskan untuk disisihkan sebagian diantaranya sehingga dapat digunakan dalam rangka membeli atau memperbaiki rumah yang akan mereka tinggali.

Tidak cukup hanya sekedar menabung dengan menyisihkan uang pendapatan mereka, para MBR pun kemudian dihadapkan dengan konsekuensi logis berupa tindakan menghemat segala bentuk pengeluarannya. Kebutuhan-kebutuhan tertentu yang sebelumnya tercukupi walau sederhana, sekarang menjadi berkurang atau hilang sama sekali akibat uang pendapatan yang tersisihkan sebelumnya.

Pemenuhan akan kebutuhan perumahan bagi MBR merupakan sesuatu yang dijamin dalam UU Negara. Oleh karena itu, muncul lah berbagai upaya dari pihak pemerintah untuk mewujudkannya, demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Tidak terkecuali hal ini juga diemban oleh pemerintah pusat, yang menerbitkan berbagai program yang selaras dengan tujuan bersama. Dalam hal pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR, khususnya perumahan yang layak huni, maka Pemerintahan Kota Bukittinggi meluncurkan Program Bedah Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah tersebut.

Dalam implementasi program tersebut, Pemko Bukittinggi mengalokasikan bantuan sebesar 17,5 juta rupiah per rumah. Bantuan tersebut terbagi dua, dengan masing-masing untuk bahan bangunan sebesar 15 juta, dan untuk upah pekerja sebesar 2,5 juta. Program ini lebih bertujuan sebagai pemancing atau meringankan biaya bagi para MBR yang bertempat tinggal di rumah-rumah yang berkategori tidak layak huni. Artinya, apabila biaya bedah rumah yang bersangkutan memakan biaya yang lebih banyak dari besarnya bantuan, para MBR itu sendirilah yang akan mencukupinya. Segala bantuan pada program ini lebih bersifat swadaya, sehingga diharapkan adanya usaha MBR dan lingkungan sekitar terlibat bersama dalam menyukseskan berjalannya program. Atas asumsi tersebut, tidak heran kemudian para MBR penerima bantuan berupaya menyelesaikan bedah rumah mereka dengan mengajak warga di lingkungan social mereka untuk berpartisipasi bersama-sama. Untuk menyukseskan implementasi bantuan Program Bedah Rumah, MBR dibantu oleh warga di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Karena bantuan pada program bertujuan memancing swadaya masyarakat, maka praktek di lapangan mengindikasikan adanya upaya-upaya yang dilakukan MBR dalam membangkitkan partisipasi dan solidaritas bersama di lingkungan social si penerima bantuan. Kenyataannya, pada pekerjaan bedah rumah, warga sekitar terlibat dalam pengerjaan renovasi. Hal ini yang kemudian semakin meringankan beban MBR dalam penyelesaian bantuan program tersebut.

Evaluasi Program Penyediaan Pemenuhan Perumahan Pada MBR

Berdasarkan penjelasan terdahulu, telah teridentifikasi berbagai program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di Kota Bukittinggi. Hal ini selaras dengan UUD 1945 dalam pasal H Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar sehingga setiap warga negara Indonesia berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Atas asumsi itu lah maka pada sub bab ini peneliti ingin melakukan pembahasan terhadap evaluasi berbagai program tersebut pada keefektifannya memenuhi penyediaan perumahan bagi MBR di Kota Bukittinggi.

Menurut Dunn (2012), evaluasi merupakan serangkaian informasi mengenai nilai atau manfaat suatu hasil kebijakan. Secara umum, kriteria yang digunakan sebagai alat mengukur evaluasi suatu kebijakan atau program ialah: (1) Efisiensi, (2) Kecukupan (*adequancy*), (3) Responsivitas, dan (4) Ketepatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perhitungan efektivitas didapatkan bahwa nilai efektivitas yaitu program pemenuhan kebutuhan rumah yang telah dilakukan dinilai cukup efektif. Kemudian, pada tingkat efisiensi yang dinilai dari segi pemantauan kerumah dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dinilai cukup efisien. Pada perhitungan yang dilakukan dari segi kecukupan bantuan yang diterima yang berada pada taraf cukup. Pada perhitungan yang dilakukan dari segi manfaat yang dirasakan masyarakat penerima bantuan berada pada taraf cukup. Dari hasil perhitungan dengan nilai ketepatan dapat disimpulkan bahwa dari segi pendapatan dinilai sudah tepat karena keseluruhan dari responden memenuhi persyaratan dari segi pendapatan untuk mendapatkan bantuan.

Referensi

- Abbas, Ibnu. 2017. Evaluasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Paradigma (JP)* 4 (2): 80–91.
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta.
- Budiharjo, Eko. 1998. *Arsitektur Perumahan Perkotaan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Fadhilah, Fauziah Rizky. 2021. Analisis Efektivitas Penyaluran Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi Di Bank BTN KC Syariah Medan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Masa Pandemi COVID-19. Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Frick, Heinz. 2006. *Arsitektur Hijau*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ghafaralie, B. 2013. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Tahun 2013. Fisip UMRH.
- Jannah, Lina Miftahul dan Bambang Prasetyo. 2011. Pendekatan Kuantitatif. Materi Pokok Metode Penelitian Kuantitatif, 1–19.
- Kusnoputranto, Haryoto. 1997. *Air Limbah Dan Ekskreta Manusia*.
- Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Alumni.
- Sastra, M S, dan E Marlina. 2006. *Perencanaan Dan Manajemen Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: CV Andi Offs.
- Silas, Johan. 1993. “Perumahan: Hunian Dan Fungsi Lebihnya, Dari Aspek Sumberdaya Dan Eksistensi.” Pidato Pengukuhan Untuk Jabatan Guru Besar Teknik Arsitektur FTSP ITS Surabaya 15 Mei.
- Statistik, Badan Pusat. 2021. *Bukit tinggi Dalam Angka 2020*. Bukit tinggi: Badan Pusat Statistik.
- Sukmarini, H. 2019. “Pembangunan Wilayah Yang Berkeadilan Pada Sektor Perumahan: Supplu Demand Penyediaan Perumahan Bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).” In Seminar Nasional Teknologi Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana, 453–59.
- Sulestianson, Erick dan Petrus Natalivan Indrajati. 2014. “Penanganan Permukiman Kumuh Dengan Pendekatan Karakteristik Dan Faktor Penyebab Kekumuhan (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tamansari Dan Kelurahan Braga).” *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota BSAPPK V3N2*, Dapat Diunduh Pada [Http://Sappk.Itb.Ac.Id/Jpwk2/Wp-Content/Uploads/2014/08/Erick-Sulestianson.Pdf](http://Sappk.Itb.Ac.Id/Jpwk2/Wp-Content/Uploads/2014/08/Erick-Sulestianson.Pdf).
- Taufik, Yuyun, dan Santy Sriharyati. 2020. “Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran.” *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)* 6 (2): 203–11.
- Turner, John F Charlewood, and Robert Fichter. 1972. *Freedom to Build: Dweller Control of the Housing Process*. Macmillan Company; Collier-Macmillan Lim.
- Walgito, Bimo. 1978. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Yogyakarta: ANDI.” Edisi Revisi.
- Yushy, Yushy. 2017. “Evaluasi Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kota Padang.” Universitas Andalas.

